



STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH YANG INTER-KONEKSI TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN IKN

Disampaikan Pada
Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung Samarinda

Oleh :
YUSLIANDO

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, 8 November 2022

PROFIL UMUM DAERAH

UU No. 3 Tahun 2022
Ditetapkan sebagai
IKN-RI



Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 3.803.972 jiwa & terus meningkat menjadi 3.891.849 jiwa pada smst 1 tahun 2022



Memiliki luas wilayah 16,7 juta ha yang terdiri dari luas laut 4 juta ha dan luas daratan 12,7 juta ha (65%-nya merupakan kawasan hutan)



Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,3%



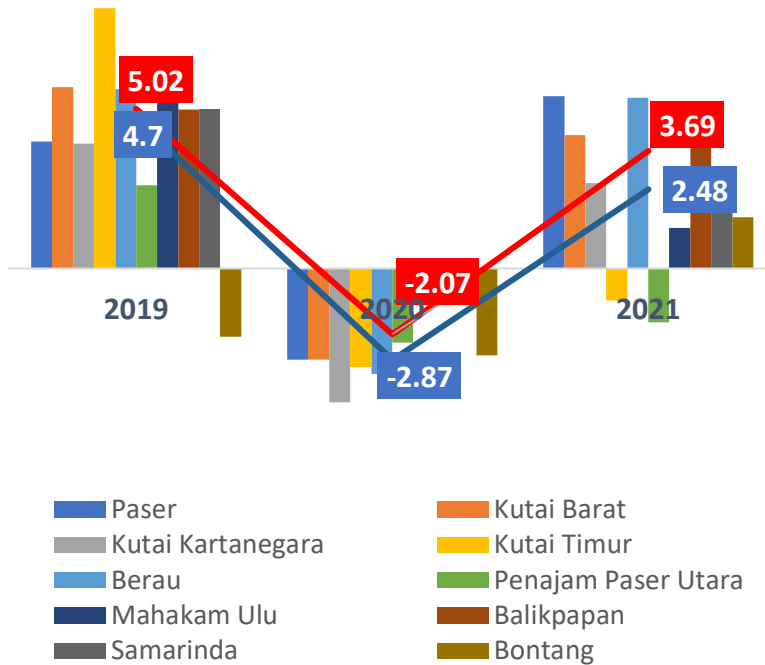
Tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,48% dan Tahun 2022 telah mencapai 3,03% (TW II)



Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari tahun sebelumnya, hingga mencapai 2,15% pada tahun 2021, sampai dengan Oktober 2022 Laju Inflasi mencapai 4,94%

KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

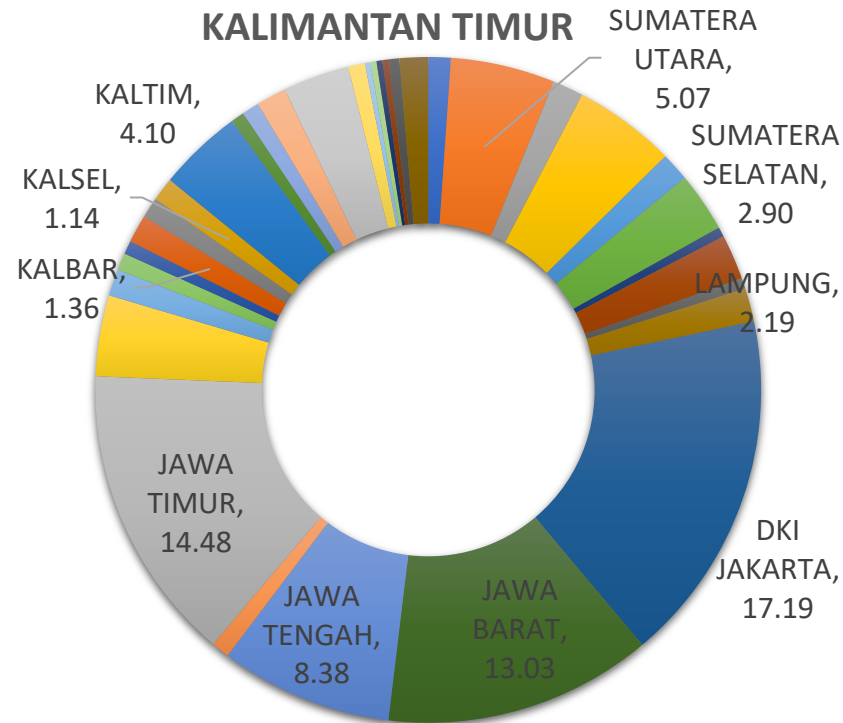
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



LPE 2021 membaik pada angka 2,48%, yang didorong oleh beberapa faktor :

1. Menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan Covid-19 dan tingginya cakupan vaksinasi;
2. Relaksasi aktivitas ekonomi masyarakat;
3. Persiapan pembangunan IKN dan keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dan daerah

KONDISI PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi 4,10% kepada perekonomian Indonesia pada tahun 2021, urutan ke 7 terbesar dengan Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 17,19% dan Jawa Timur 14,48%

STRUKTUR EKONOMI KALTIM

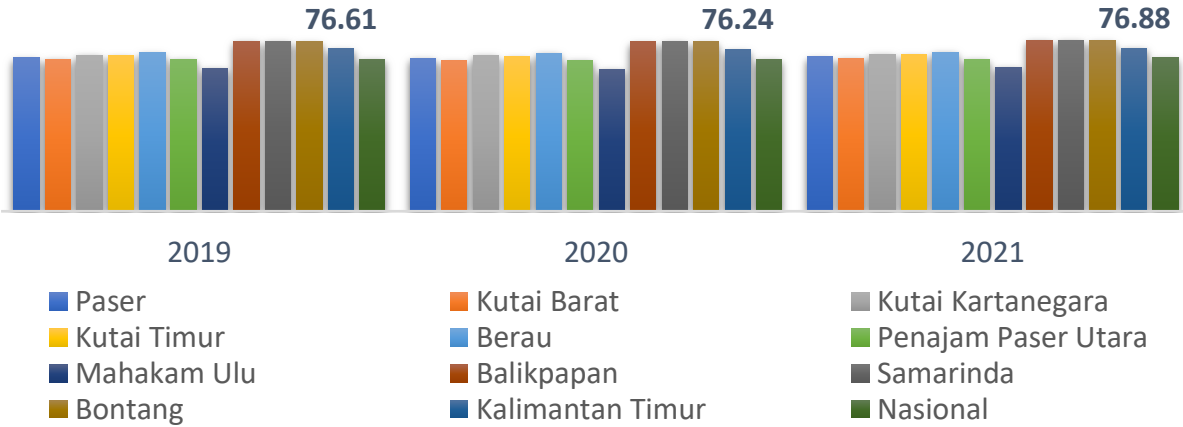


Struktur PDRB KALTIM didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalan 45,05%, diikuti Industri Pengolahan 17,81%. Sementara untuk sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,48%%

KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada tahun 2021, IPM KALTIM mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin, menjadi 76,88. Samarinda adalah IPM tertinggi di KALTIM sebesar 80,76



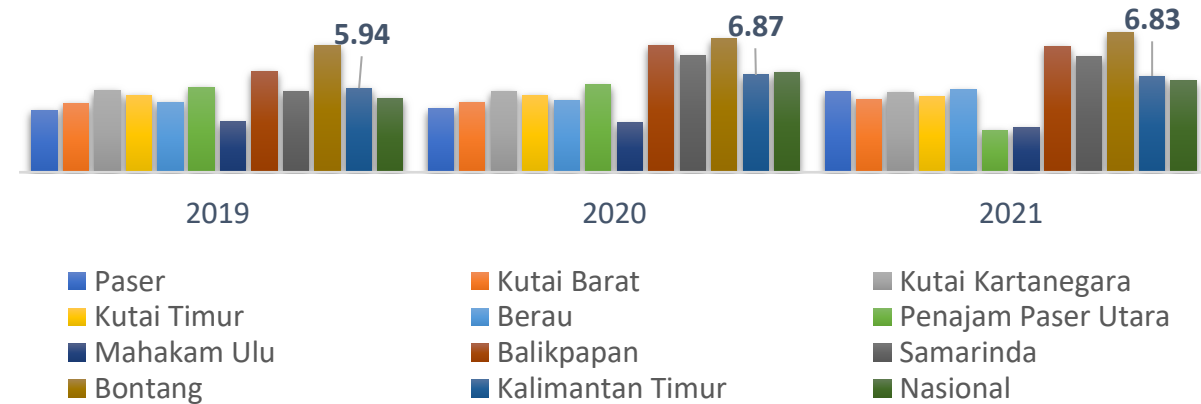
TINGKAT KEMISKINAN

Persentase Penduduk Miskin KALTIM pada tahun 2021 sebesar 6,54% meningkat 0,44 poin terhadap 2020.



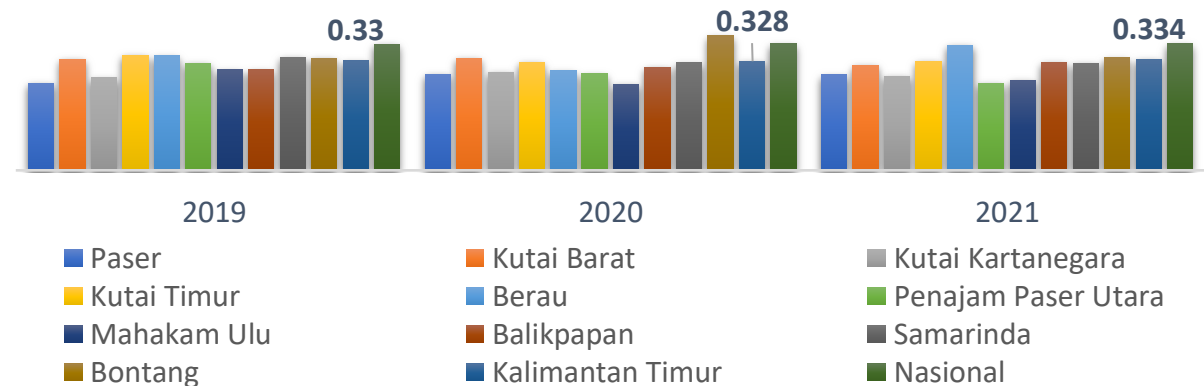
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pada tahun 2021, TPT KALTIM mengalami penurunan sebesar 0,04 poin, menjadi 6,83%. Bontang TPT tertinggi di KALTIM sebesar 9,92%



INDEKS GINI

Indeks Gini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020 dari 0,328 menjadi 0,334, namun masih berada di bawah nasional



CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 DAN TARGET DI TAHUN 2023

No	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Target 2021	Capaian 2021	Target 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,75	76,88	77,75
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,54	5,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,83	6,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,00	2,48	3,5 ₊₁
5.	Indeks Gini	0,313	0,334	0,308
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,95	75,06	76,15

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, target Pembangunan KALTIM di Tahun 2024 sbb :

No	Indikator Makro Pembangunan Wilayah	Target 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,50
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,35
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,10

UNTUK MEMENUHI PENCAPAIAN TARGET TERSEBUT, DIBUTUHKAN DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT

VISI & MISI KALTIM 2019-2023



”

BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT

”

MISI 1

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

MISI 2

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

MISI 3

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

MISI 4

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

MISI 5

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

MESKIPUN PERIODESASI RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023 AKAN
SEGERA BERAKHIR, NAMUN
KEWAJIBAN UNTUK TETAP
MENJAGA KONTINUITAS DAN
SINERGITAS KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KEDEPAN PERLU UNTUK TETAP
DIJAGA

TIMELINE PELAKSANAAN PEMINDAHAN IKN

2019

Penetapan Lokasi IKN, Penyusunan Penyelesaian kajian-kajian, draft Naskah Akademik & RUU IKN

2020

Penyusunan masterplan dan perencanaan teknis Kawasan

2021

- Penyusunan & Pembahasan RUU,
- Penyusunan DED Kawasan
- Ground Breaking Pembangunan IKN

2022-2024

- Penetapan UU IKN,
- Penyusunan UU Rencana Pelaksana IKN
- Pembangunan KIPP dan Kawasan IKN



Presiden mengumumkan lokasi calon IKN baru, di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara Jakarta



POIN-POIN PENTING DALAM UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IKN

Pasal 6

Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada [Kalimantan Timur]

Pasal 7 Ayat (1)

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Pasal 8

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara

Pasal 22

Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara

Pasal 23

Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

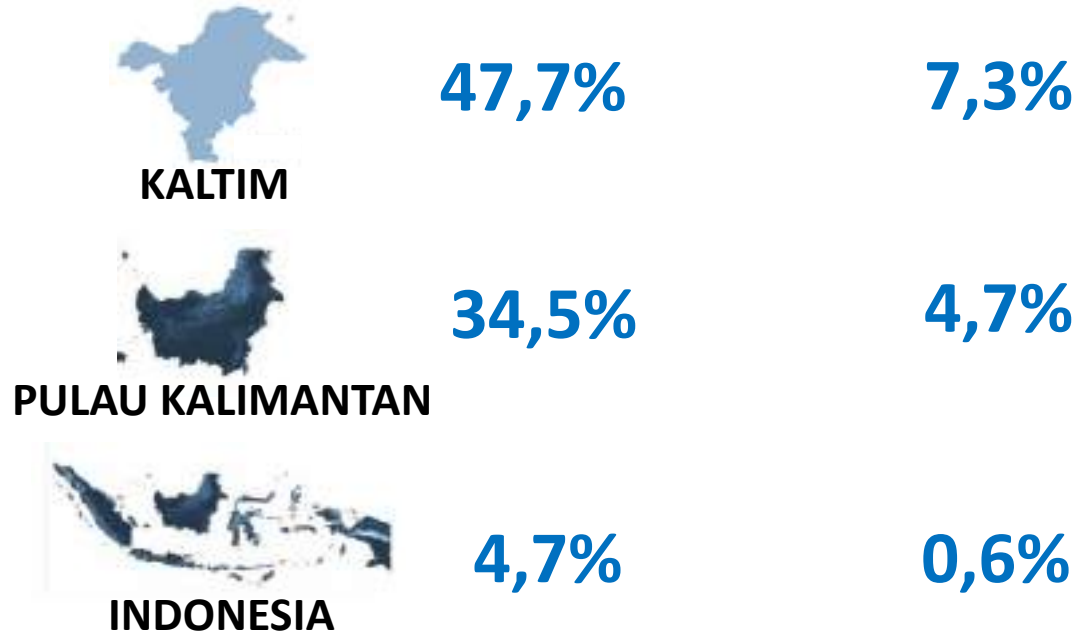
- Menimbang :
- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan nyan beregara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila;
 - bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan nyan beregara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertarikan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia;
 - bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;

e. bahwa ...

DAMPAK PEMBANGUNAN IKN DI KALTIM

Peningkatan Investasi Riil

Pertumbuhan Ekonomi



Penambahan Jumlah Penduduk Tahun 2045 → 1,911 Juta orang

- ASN & Keluarga : 500.019 orang
- Kemhan, POLRI, TNI, BIN, BSSN & Keluarga : 394.220 orang
- Pegawai Badan Publik & Keluarga : 6.195 orang
- Pelaku Ekonomi & Keluarga : 751.705 orang
- Mahasiswa : 88.812 orang
- Penduduk Eksisting : 171.037 orang

Sumber : Rencana Induk IKN, 2022

Peningkatan Kesempatan Kerja



RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KERJA IKN

- Terbukanya lapangan kerja & peluang bagi masyarakat Kalimantan Timur;
- Kompetensi harus memenuhi kebutuhan pasar kerja;

Kebutuhan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja (orang)										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2045
Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari Industri di dalam IKN	-	-	-	51,256	52,690	54,124	55,560	56,994	66,105	82,403	99,213
Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari Industri dalam IKN	-	-	-	130,706	134,270	137,834	141,398	144,962	163,809	188,771	227,703
Tenaga Kerja Sektor Konstruksi pada masa Pembangunan IKN	15,713	16,313	16,913	17,500	18,090	18,680	19,270	19,860	3,878	31,624	41,372

Sumber : Rencana Induk IKN, 2022

MASTER PLAN IBU KOTA NEGARA

8 Prinsip dan 24 KPI IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua

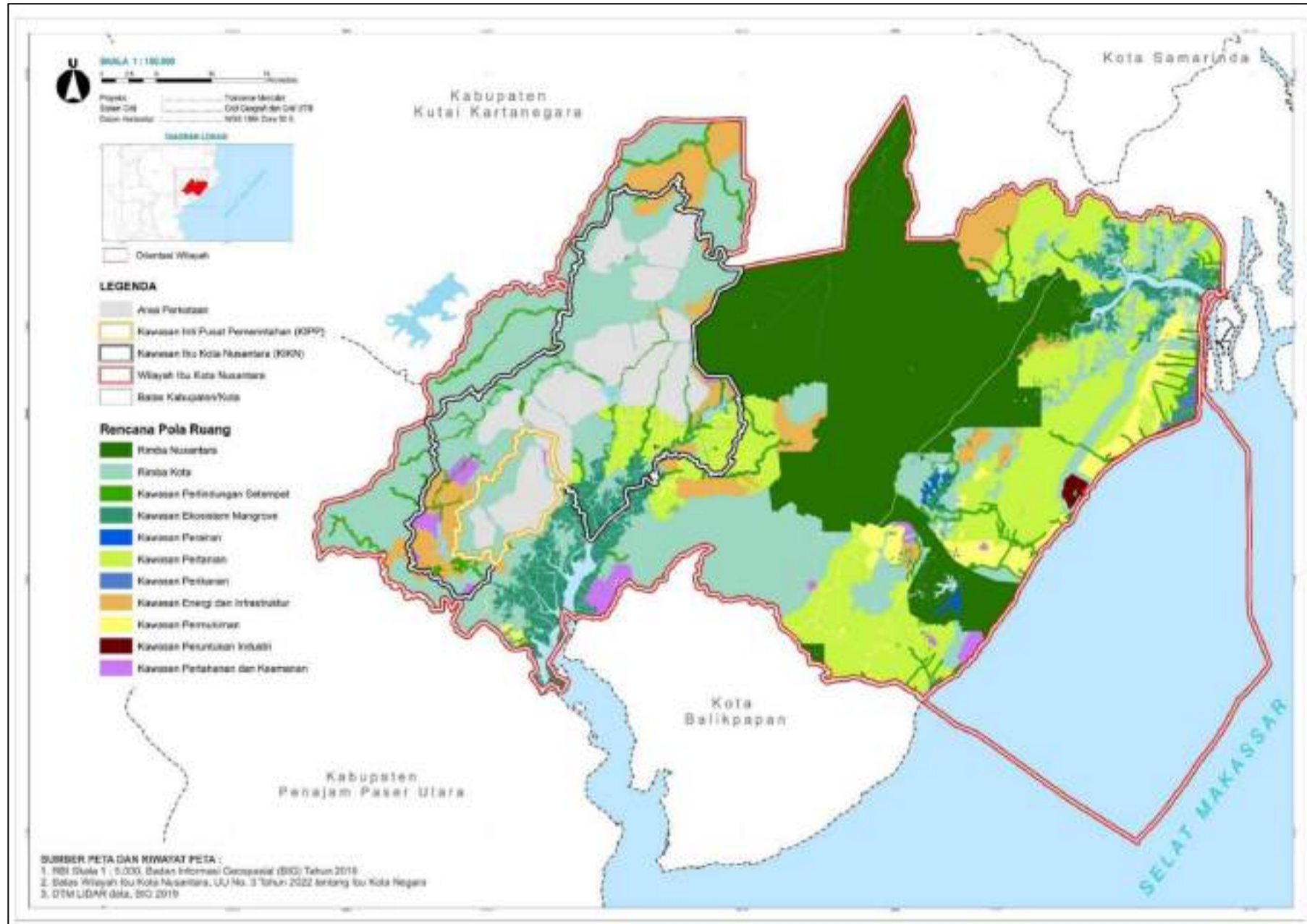
1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler & Tangguh	6. Aman & Terjangkau	7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
1.1 >75% dari 256.000 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)	2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru	3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN	5.1 >10% dari lahan 256.000 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045	7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh UN	8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035
1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit	2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit	3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung	5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.000 memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045	7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis	8.2 PDRB per kapita negara berpendapatan tinggi
1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)	2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif	3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030	4.3 Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256.000 Ha	5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	6.3 Perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah dan sederhana	7.3 >75% Business Satisfaction dengan peringkat Digital Services	8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045

Pembangunan di Kaltim Perlu dipacu lebih cepat agar tidak terjadi Disparitas yang tinggi dengan IKN.....

Sumber :
Rencana Induk IKN, 2022

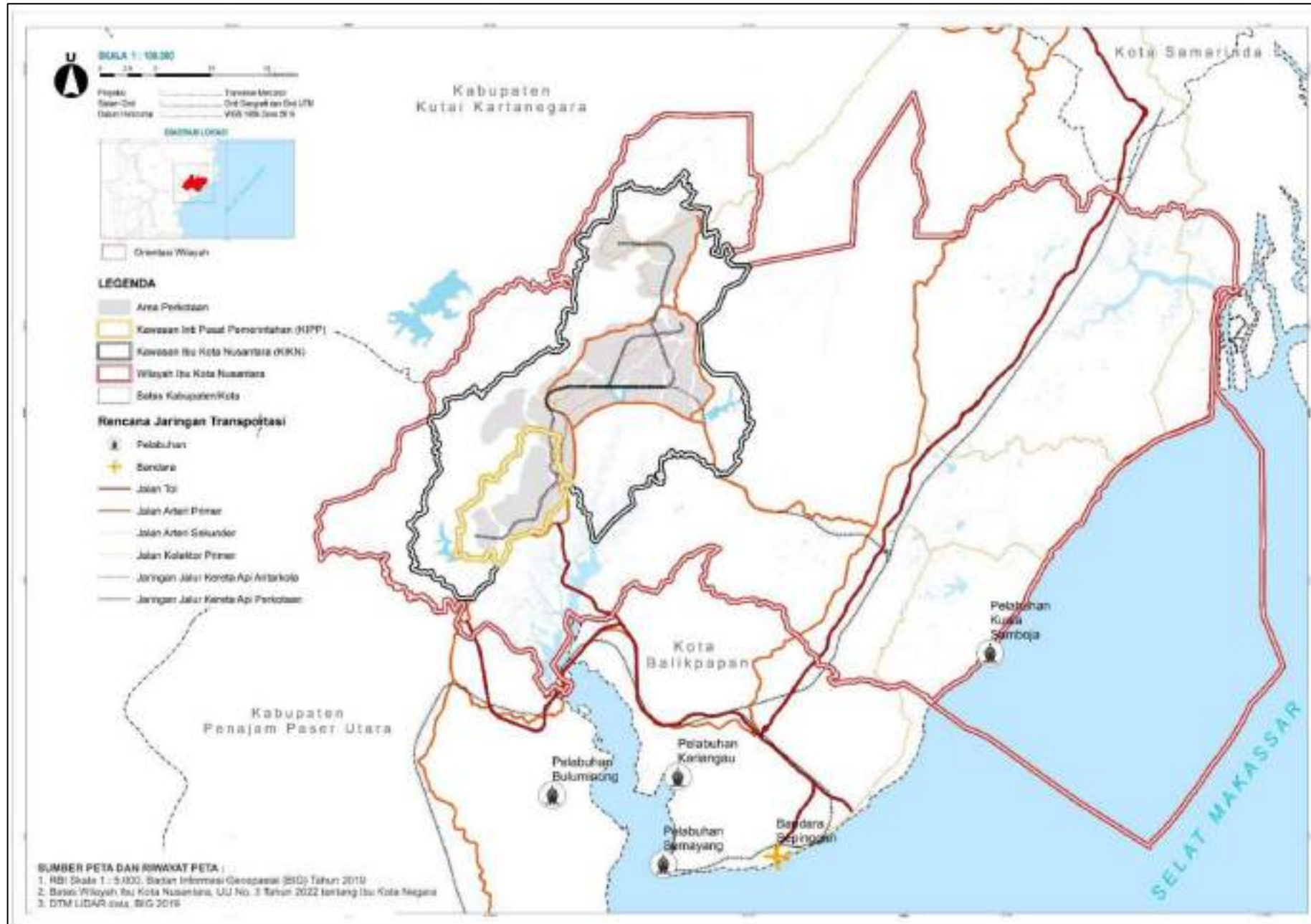


MASTERPLAN IKN (2) – POLA RUANG



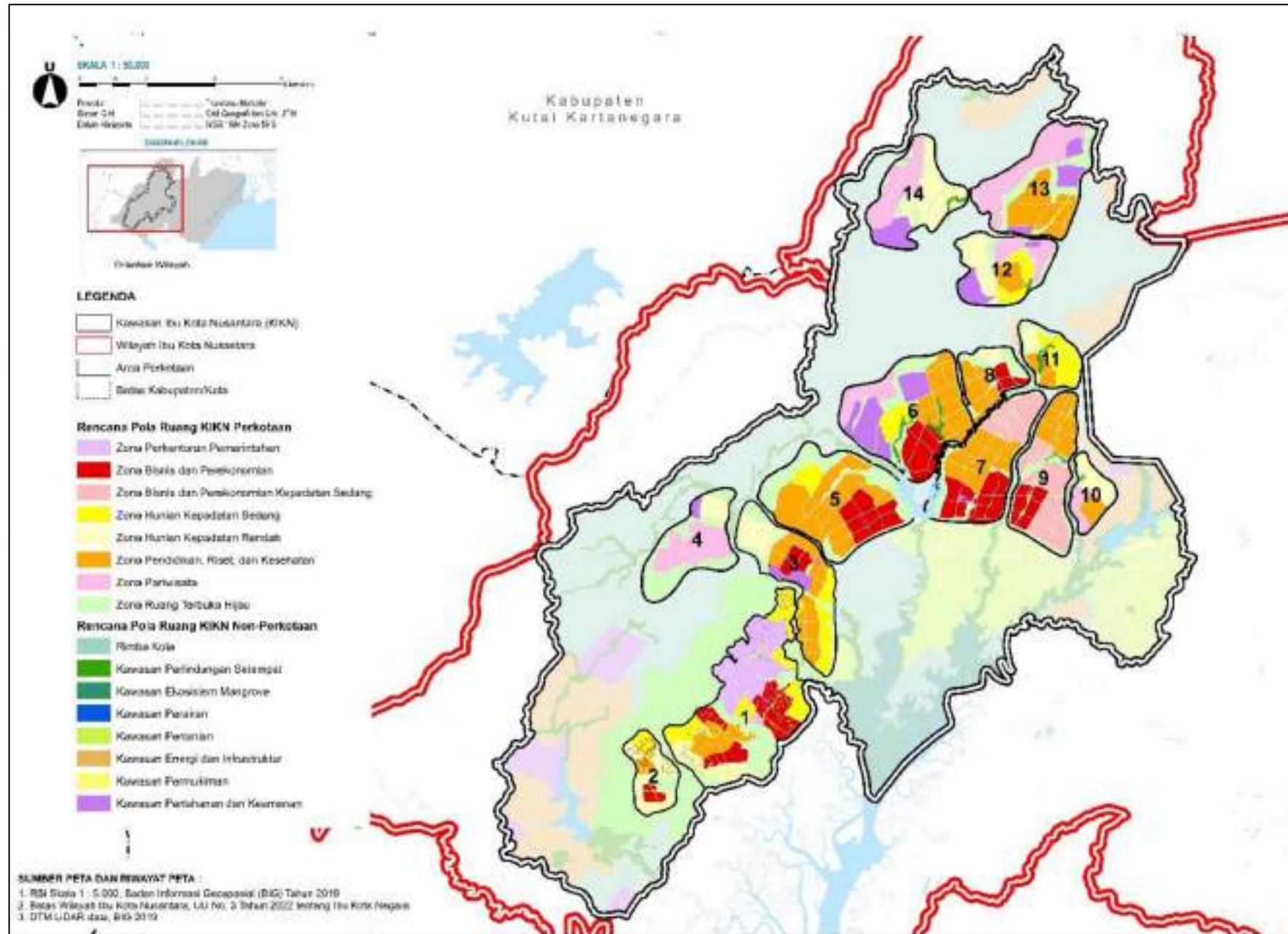
Sumber :
Rencana Induk IKN, 2022

MASTERPLAN IKN (3) – JARINGAN TRANSPORTASI



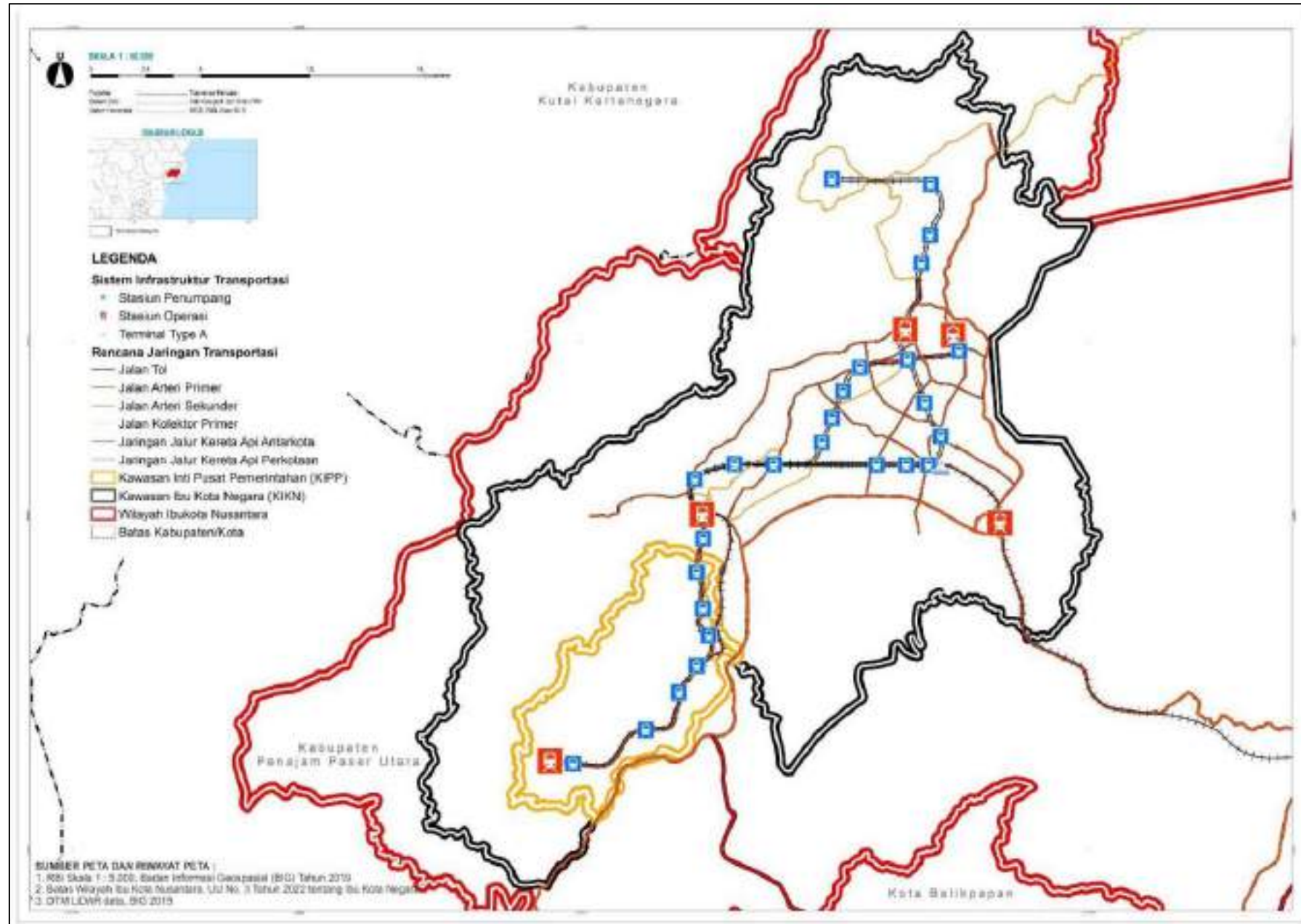
Sumber :
Rencana Induk IKN, 2022

MASTERPLAN KIKN (1) – POLA RUANG KAWASAN INTI



Sumber :
Rencana Induk IKN, 2022

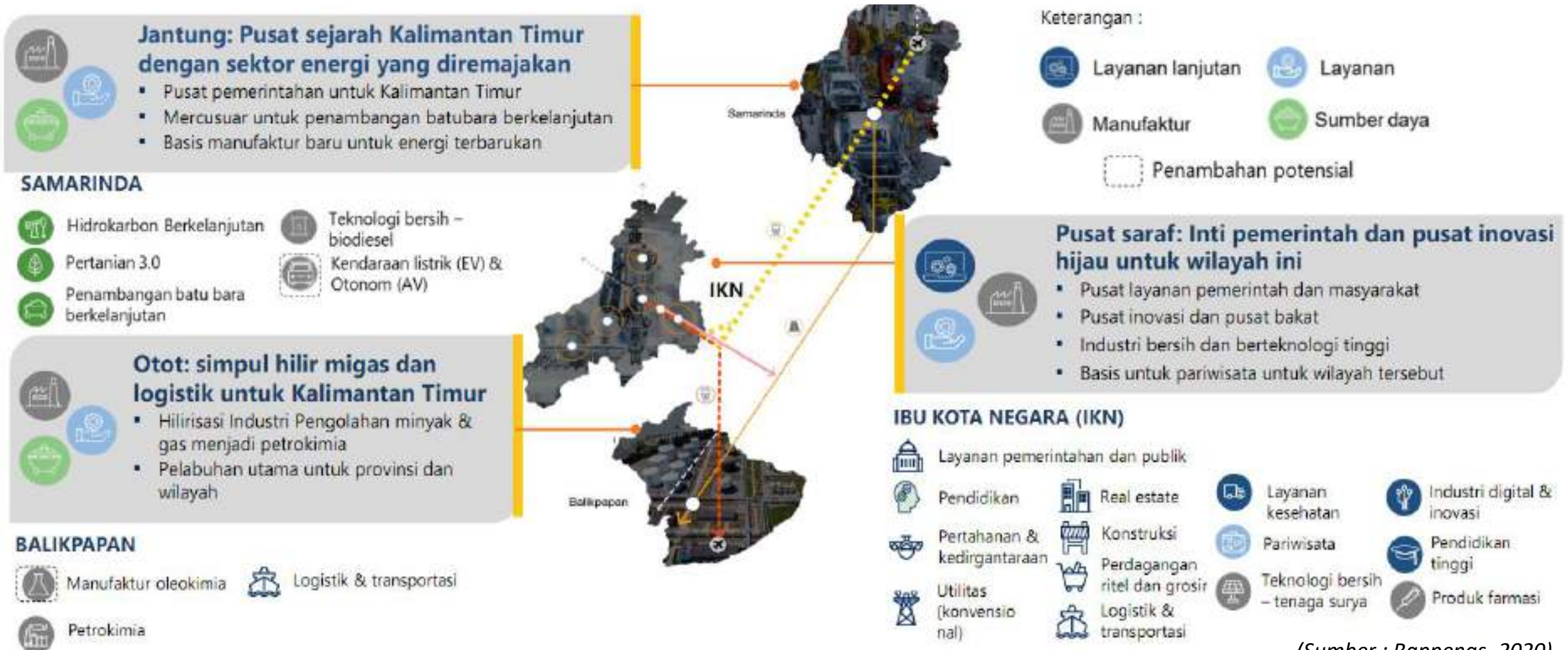
MASTERPLAN KIKN (2) – JARINGAN TRANSPORTASI KAWASAN INTI



Sumber :
Rencana Induk IKN, 2022

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI DI KAWASAN IKN DAN KALTIM MELALUI KOLABORASI 3 KOTA

1. Diversifikasi dan Penciptaan Sektor Ekonomi Baru
2. Prinsip Pengembangan Industri : *Suistainable, Green, and Technologycal Advanced*



(Sumber : Bappenas, 2020)

HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM RENCANA PEMINDAHAN IKN



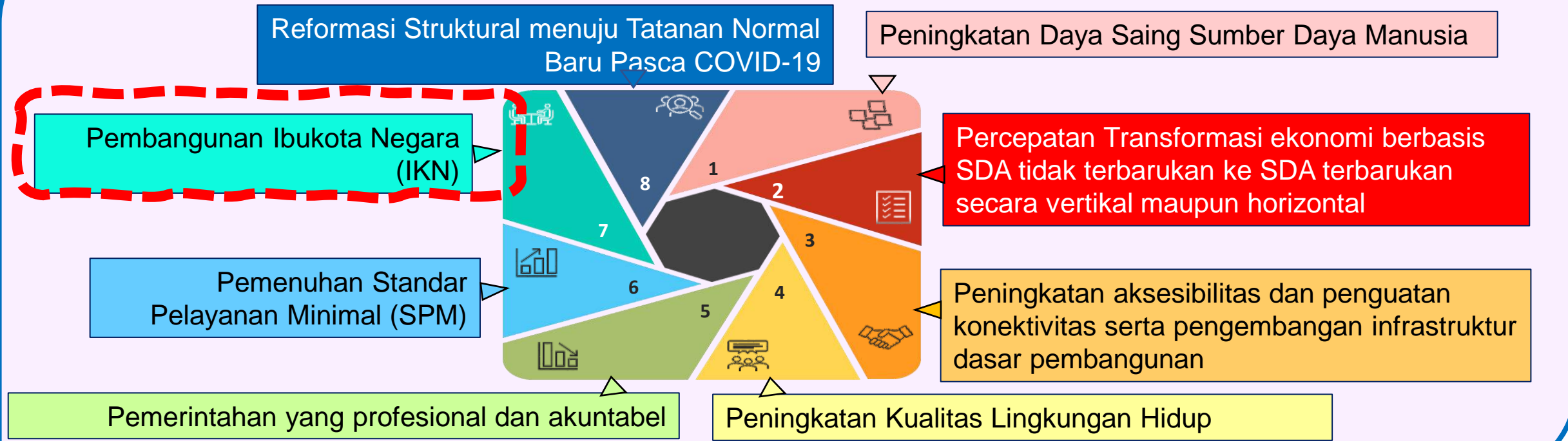
TINDAK LANJUT PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM TERHADAP IKN



EKONOMI KALTIM DAN AKOMODASI ISU PEMINDAHAN IKN DALAM DOKUMEN P-RPJMD



Akomodasi Isu Strategis dalam P-RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023



INTERKONEKSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN IKN (1)

MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas

Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia

SASARAN	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
STRATEGI	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
ARAH KEBIJAKAN	<div>1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja</div> <div>2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)</div> <div>3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT</div> <div>4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu</div> <div>5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh</div> <div>6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT</div>	<div>1. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis</div> <div>2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</div> <div>3. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya</div> <div>4. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular</div> <div>5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat</div>

INTERKONEKSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN IKN (2)

MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas

Tujuan 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN	Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja
STRATEGI	Perluasan kesempatan kerja
ARAH KEBIJAKAN	1. Peningkatan pengembangan kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja 2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja

INTERKONEKSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN IKN (3)

MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

SASARAN	Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)		
STRATEGI	Pengembangan industri unggulan provinsi	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN	<div>1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi</div> <div>2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan</div> <div>3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM</div>	<div>1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</div> <div>2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura</div> <div>3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura</div>	<div>1. Peningkatan produksi ternak berkualitas</div> <div>2. Pengembangan Kawasan Peternakan</div>	<div>1. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan</div> <div>2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit</div> <div>3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir</div> <div>4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani</div> <div>5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi</div>

INTERKONEKSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN IKN (4)

MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

SASARAN	Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
STRATEGI	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	1. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur 2. Pengembangan ekonomi kreatif
ARAH KEBIJAKAN	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan 2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan 3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM 2. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital 3. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM 4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	1. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim 2. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim 3. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim 4. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim 5. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim

INTERKONEKSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN IKN (5)

MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar

SASARAN	Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan				
STRATEGI	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
ARAH KEBIJAKAN	1. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan 2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku 2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum 3. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN 2. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

INTERKONEKSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN IKN (6)

MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

SASARAN	Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
STRATEGI	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
ARAH KEBIJAKAN	<div>1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim</div> <div>2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan</div>	<div>1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik</div> <div>2. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT</div> <div>3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman</div>

TRANSFORMASI EKONOMI KALTIM

Tahun 2010 - 2030

Transformasi Ekonomi

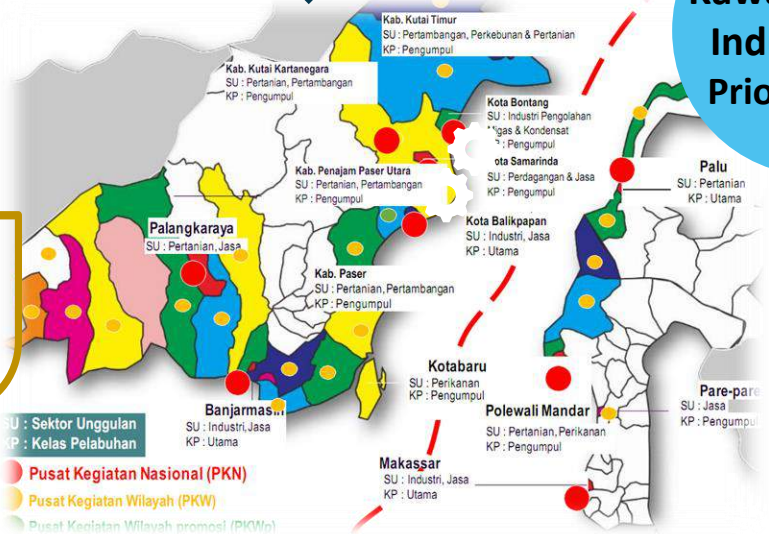
Ekonomi Kaltim sudah didominasi oleh Industri Pengolahan berbasis sumberdaya alam terbarukan



Tahun 2030 - 2050

Inovasi dan Teknologi

Ekonomi Kaltim berbasis inovasi dan pengembangan teknologi



RPJMD Kaltim 2019 – 2023
Visi : Berani Untuk Kaltim Berdaulat

SDM 01

Beasiswa Kaltim Tuntas



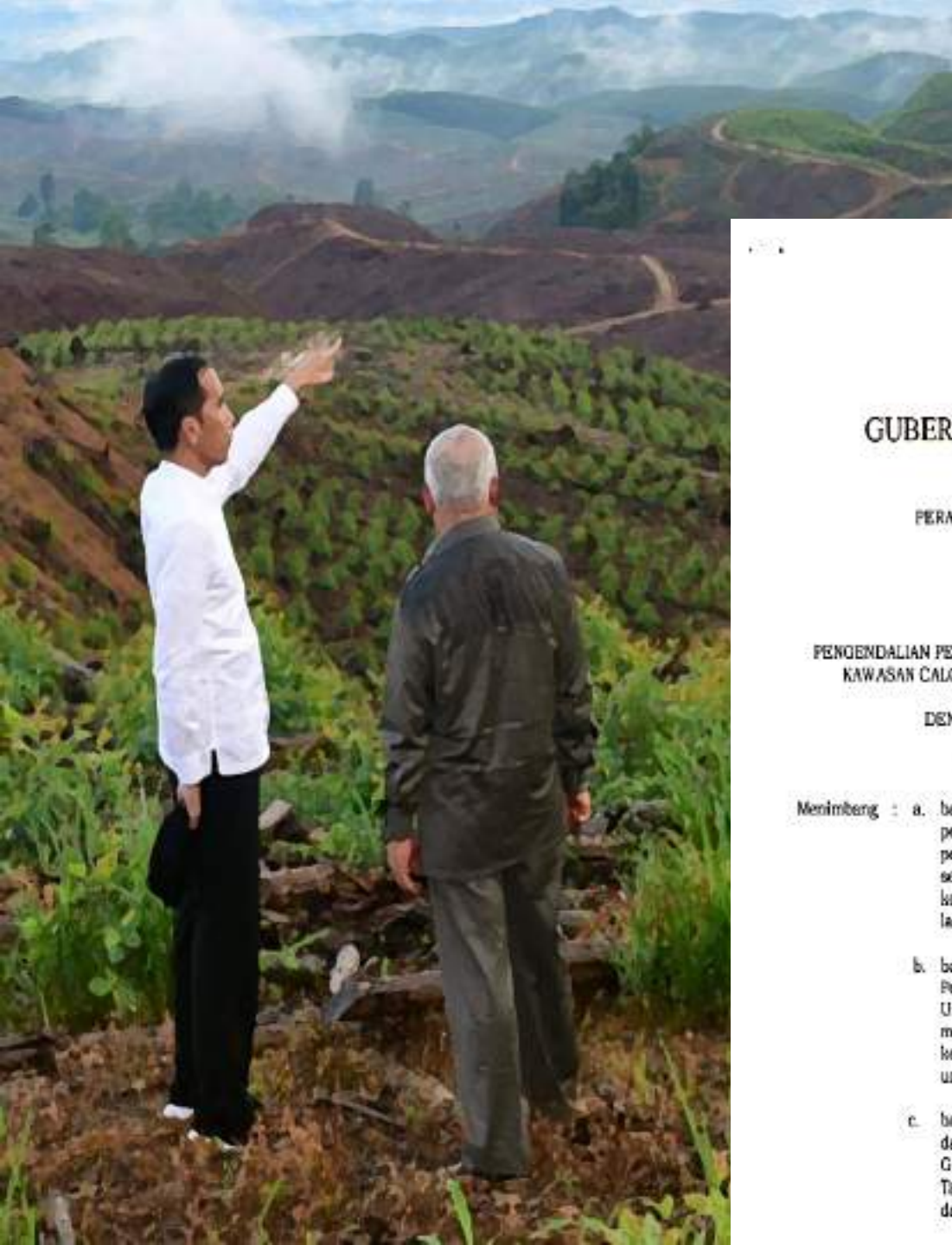
K.I. MBTK Kutai Timur

Kawasan Industri Prioritas 02

K.I. Petrokimia Bontang

K.I. Kariangau Buluminung

KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PADA KAWASAN CALON IKN DAN KAWASAN PENYANGGA



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN PADA
KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan terhadap peralihan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh perorangan, badan hukum dan/atau kelompok tertentu secara berlebihan dan tidak wajar pada kawasan calon ibu kota Negara dan kawasan penyangga, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengendalian terhadap peralihan, penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga;

BAB III

PENGENDALIAN PERALIHAN DAN PENGGUNAAN TANAH

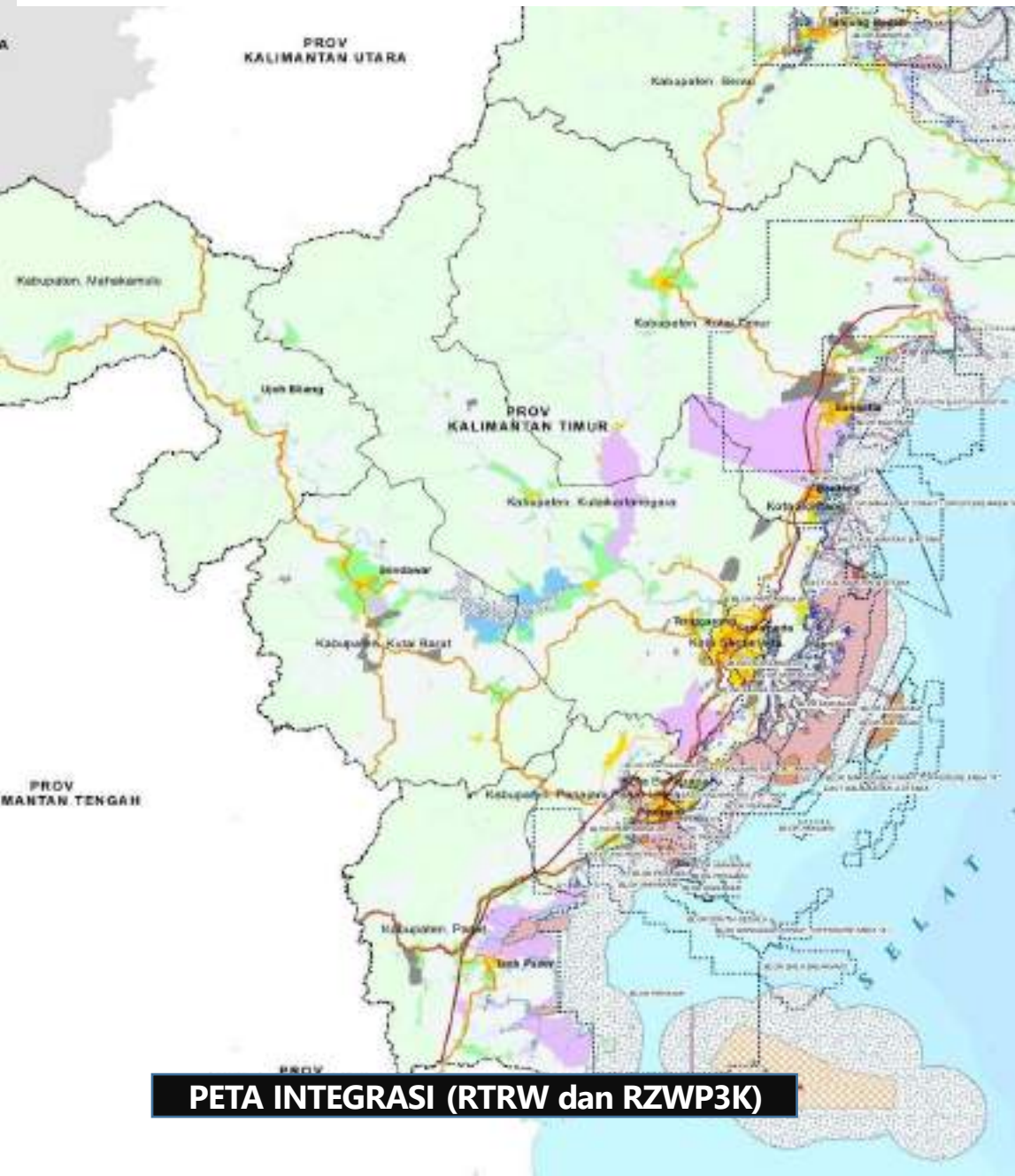
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah pada Kawasan Calon IKN dan penyangga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas dan kewenangan oleh pejabat :
 - a. Bupati Kutai Kartanegara;
 - b. Bupati Penajam Paser Utara;
 - c. Walikota Balikpapan;
 - d. Camat/PPATS, Lurah/Kepala Desa di Kawasan Calon IKN dan penyangganya;
 - e. PPAT di wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
 - f. Notaris; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh :
 - a. pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dengan melakukan pembatasan, meliputi :
 - 1) tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan dan rekomendasi di Kawasan Calon IKN dan kawasan penyangga sesuai kewenangannya, kecuali untuk kepentingan Pemerintahan;
 - 2) melakukan pengawasan, pencegahan, dan melarang terhadap penggarapan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin;
 - 3) meningkatkan peran perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah pertanahan; dan
 - 4) memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dari praktik diskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, dengan melakukan pembatasan yaitu tidak membuat/menguatkan/mengesahkan akta/surat keterangan dan/atau bentuk lain yang bermaksud untuk melegalisasi perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak atas tanah dan pelepasan tanah yang bertujuan menguasai tanah secara berlebihan, tidak wajar dan terindikasi spekulatif.

INTEGRASI RTRW-P KALTIM DAN USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN



Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522.1/1505/DK-II Tgl. 19 Maret 2021 Perihal Penjaringan Usulan Perubahan Kawasan Hutan Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Usulan Perubahan Kawasan Hutan

Usulan Perubahan Peruntukan	532.653,53 Ha
Usulan Perubahan Fungsi	22.504,894 Ha
Usulan Penunjukan Baru	15.025,423 Ha
Total	570.183,85 Ha

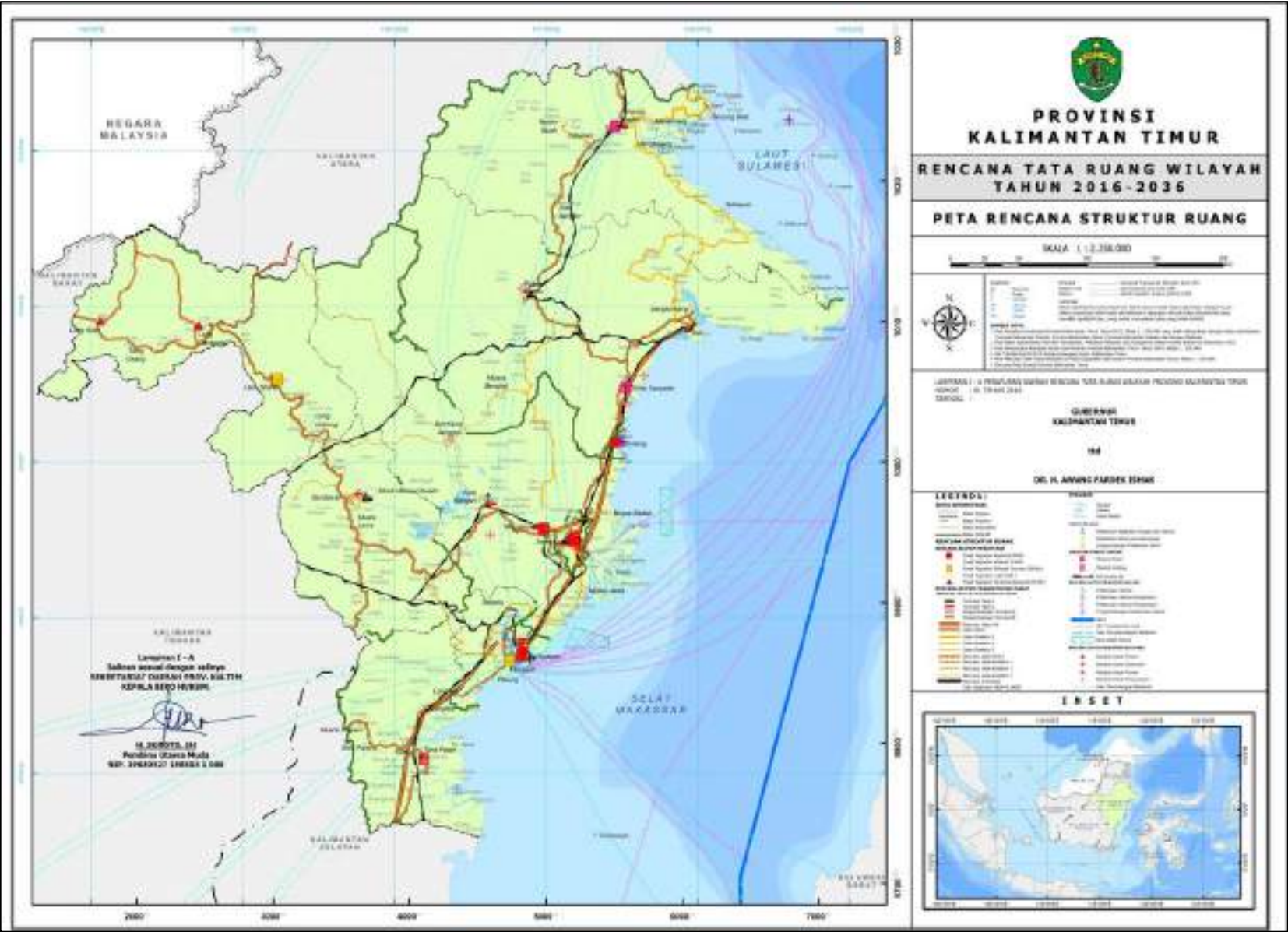
PETA INTEGRASI (RTRW dan RZWP3K)



INFRASTRUKTUR PENDUKUNG IKN & RENCANA PENGEMBANGANNYA

1.	a. Jalan Arteri (Trans Kalimantan) b. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99 km) c. Pembangunan Jalan Tol Samarinda – Bontang (target selesai 2024) d. Pembangunan Jalan Tol Akses menuju IKN e. Jalan Kolektor Samarinda – Balikpapan (pesisir pantai Samboja) f. Peningkatan Jalan Kolektor Simpang Samboja – Sepaku Semoi (PPU)
2.	Pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Balikpapan-PPU
3.	Peningkatan Bandar Udara SAMS (Balikpapan), Bandara APT Pranoto (Samarinda), dan Pembangunan Bandara Khusus VVIP dan Militer IKN
4.	Pelabuhan Semayang (Balikpapan)
5.	Terminal Peti Kemas Kariangau (Balikpapan) dan Palaran (Samarinda)
6.	Pembangunan Rel Kereta Api IKN - Balikpapan - Samarinda - Bontang
7.	Pengembangan KI Kariangau – Buluminung (Balikpapan dan PPU)
8.	Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, Batu Lepek, Safiak, Beruas, Samboja, Manggar, Teritip, Sungai Wain, Lambakan
9.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
10.	Penguatan Supply & Jaringan Listrik (rencana 2024 → 1.300 MW)
11.	Penguatan Jaringan Fiber Optic (telekomunikasi)

UPAYA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN



RUAS JALAN NASIONAL

Kondisi	Panjang (Km)	Panjang (%)
Baik	251,16	14,68
Sedang	1.144,83	66,91
Rusak	248,72	14,60
Rusak Berat	65,19	3,81
Total	1.710,90	100,00

81,59

RUAS JALAN PROVINSI

Kondisi	Panjang (Km)	Panjang (%)
Baik	408,38	45,62
Sedang	216,10	24,14
Rusak	101,48	11,34
Rusak Berat	169,13	18,90
Total	895,09	100,00

69,76

RUAS JALAN KABUPATEN / KOTA

Kondisi	Panjang (Km)	Panjang (%)
Baik	6.859,70	50,57
Sedang	2.265,13	16,76
Rusak	2.035,89	15,06
Rusak Berat	2.355,49	17,43
Total	13.516,2	100,00

67,33

UPAYA PENYEDIAAN PANGAN DAN ENERGI HIJAU

ISU-ISU
STRATEGIS

ISU NASIONAL

Perpres No.18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur

Penyediaan Pangan dan Energi Hijau



Produksi CPO kelapa sawit Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3,72 juta Ton



Kakao, aren, lada, dan kelapa dalam dirasa belum mencukupi dalam aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru



Ketersediaan daging sapi di tahun 2021 sebesar 8.411,7 ton (84,73%) dari pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi sebanyak 9.926,9 ton



Ketersediaan beras di tahun 2021 sebesar 154.058 ton (45,27%) dari pemenuhan kebutuhan konsumsi beras sebanyak 340.339 ton

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) IKN



STRATEGI PENYIAPAN TENAGA KERJA

Penduduk Kaltim Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

TINGKAT PENDIDIKAN	Th. 2014 (Orang)	Th. 2020 (Orang)	Perubahan (%)
Tidak/Belum Sekolah	718.811	1.033.178	30,43
Belum Tamat SD/Sederajat	443.334	453.272	2,19
Tamat SD/Sederajat	688.608	642.326	-7,21
SLTP/Sederajat	492.735	507.144	2,84
SLTA/Sederajat	810.093	938.860	13,72
Perguruan Tinggi	210.048	275.052	23,63
Total	3.363.629	3.849.832	12,63

sumber: DKP3A Prov. Kaltim, 2022

Beasiswa Kaltim Tuntas Tahun 2021

KATEGORI	JUMLAH PENERIMA	ALOKASI DANA (Rp)
TUNTAS MAHASISWA	3.368	107.292.221.510
STIMULAN MAHASISWA		
A. Umum	3.717	23.252.000.000
B. Khusus (miskin)	556	3.358.000.000
STIMULAN SISWA		
A. Umum	4.988	8.870.500.000
B. Khusus (miskin)	4.276	7.876.000.000
SERTIFIKASI	9.264	16.746.500.000
TOTAL	18.541	162.295.574.510

sumber: Disdikbud Prov. Kaltim, 2022



Peningkatan Akreditasi PTN (utamanya Universitas Mulawarman dan Institut Teknologi Kalimantan) setara dengan UI/ITB/IPB/UGM;

Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasi (misalnya SMK dan BLK), utamanya yg dibutuhkan dalam pembangunan IKN;

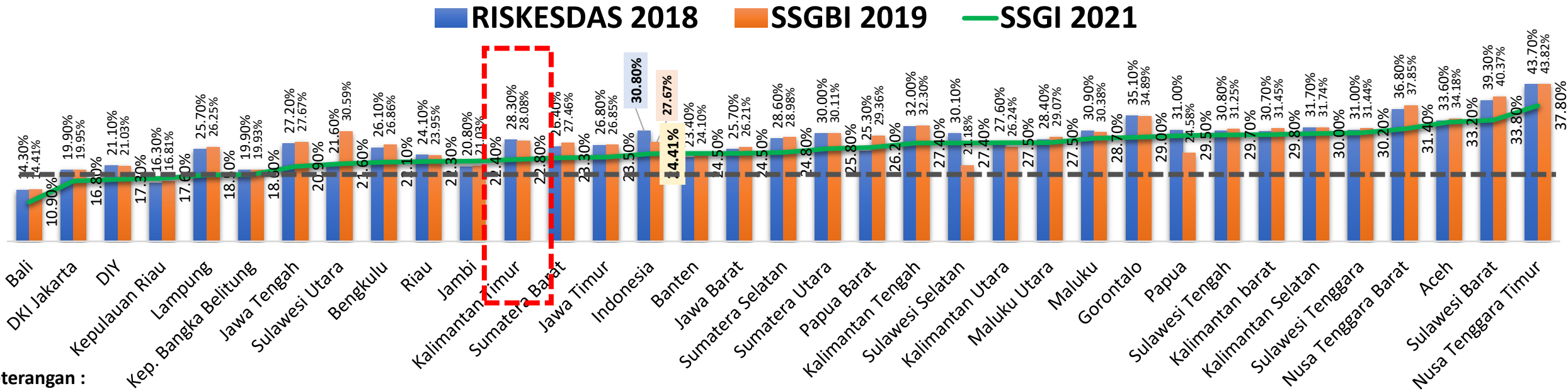
Pemberian Beasiswa Daerah (KALTIM TUNTAS) kepada para siswa dan mahasiswa;

Mempermudah akses dan membuka peluang perolehan sertifikasi tenaga ahli dan terampil di yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN;

Membuka peluang kerjasama dengan institusi pendidikan yang kredibel dalam hal penyediaan pelatihan/instruktur (jika dibutuhkan)

PERHATIAN SEKTOR KESEHATAN

Prevalensi *Stunting* Nasional



Keterangan :
----- Batas maksimal toleransi angka *stunting* WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh

TARGET PREVALENSI STUNTING KALTIM TAHUN2022-2024

Provinsi	SSGI 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Kalimantan Timur	22.8	19.37	16.08	12.83



Sasaran Prioritas
Ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun
atau rumah tangga 1.000 HPK



Intervensi Prioritas

- Intervensi gizi spesifik
- Intervensi gizi sensitif



Kabupaten/kota prioritas

- 2020 => 10 kabupaten/kota
- 2021 => 10 kabupaten/kota
- 2024 => semua kabupaten/kota

TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PEMINDAHAN IKN

Percepatan upaya **TRANSFORMASI EKONOMI** dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial daerah yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan

Mempercepat pembangunan dan pemerataan pertumbuhan wilayah, khususnya di sektor **INFRASTRUKTUR** dari dan menuju IKN

Upaya percepatan pemulihan **EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL** di daerah pasca Pandemi COVID-19



Peningkatan **KAPASITAS DAN KUALITAS SDM** lokal yang memiliki daya saing sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja dalam pengembangan IKN

Peningkatan **KUALITAS LINGKUNGAN** melalui rehabilitasi Kawasan hutan, pemulihan fungsi Kawasan lindung, serta mitigasi dan pengurangan resiko bencana

HARAPAN PROVINSI KALTIM DENGAN ADANYA PEMINDAHAN IKN



Berkembangnya perekonomian yang berkelanjutan di wilayah sekitar IKN semakin meningkat

Masyarakat Kaltim mendapatkan kesempatan kerja dengan layak baik dimasa konstruksi maupun ketikan IKN sudah beroperasi

Meningkatnya kualitas Pendidikan, Kesehatan dan lingkungan hidup di Kaltim

Infrastruktur di Kaltim semakin baik seiring dengan adanya pemindahan IKN



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**